

PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

**Yunyun Ratna H¹⁾
Eki Dudi Darmawan²⁾
Jaka Sudewa³⁾**

¹*Politeknik Piksi Ganesha, yunyunratna@ymail.com*

²*Institut Manajemen Koperasi Indonesia, jakasudewa@ikopin.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner dan kajian pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis koefisien korelasi Rank Spearman dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Nilai yang diperoleh menggunakan koefisien determinasi sebesar 75.69% dan 24.31% dipengaruhi oleh faktor lain-lain. Koefisien korelasinya adalah 0.87, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan memiliki hubungan sangat erat.

Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Kualitas Pelayanan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of employee performance on the quality of population administration services in Margahayu District, Bandung Regency.

The research method used is quantitative method and data collection techniques are observation, questionnaires and literature review. The analytical technique used is the Spearman Rank correlation coefficient analysis and the coefficient of determination.

The results of the study indicate that employee performance affects the quality of population administration services. The value obtained using the coefficient of determination is 75.69% and 24.31% is influenced by other factors. The correlation coefficient is 0.87, this shows that employee performance and the quality of population administration services have a very close relationship.

Keyword: Performance, Service Quality

PENDAHULUAN

Isi Pembukaan UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan yang adil dan beradab, dengan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena amanat itu, kebutuhan dan hak setiap warga negara harus dipenuhi oleh Pemerintah. Lebih jelas dalam UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah menegaskan langkah strategis untuk mewujudkan harapan masyarakat yang

berkualitas. (R. C. Kurniawan, 2016) (Jamaluddin, 2016).

Pelayanan publik yang baik akan terwujud bila para penyedia layanan memiliki kinerja yang baik dan tercermin dalam perilaku sehari-hari di dalam organisasi. Kemampuan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya (Debbi & Kania, 2010) (Fernandez et al., n.d.)

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditunjukkan untuk kepentingan publik atau masyarakat. (Maryani, 2013). Kegiatan tersebut mencakup adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pegawai pemerintah. Tentu saja untuk itu dibutuhkan kinerja pegawai yang baik sehingga dapat menciptakan pelayanan yang relatif lebih baik pula.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 mengenai Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan memberikan tugas kepada Kantor Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah. (I. Kurniawan, 2011). Pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat (pegawai pemerintahan) sangat penting sebab tingkat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin kompleks. Rasa puas masyarakat dalam pelayanan publik akan terpenuhi ketika apa yang diberikan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama ini, dimana dalam pelayanan tersebut terdapat tiga unsur pokok yaitu biaya relatif murah, waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat dan mutu yang diberikan relatif lebih baik.

Namun, pada kenyataannya belum semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memuaskan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari 30 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang berperan aktif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, salah satu pelayanan yang diberikan adalah pelayanan administrasi kependudukan yang diharapkan mampu menerapkan dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelayanan administrasi kependudukan tersebut ditentukan oleh gaya sikap dan tindakan, yang dapat dilihat dari

cara para pegawai melakukan suatu pekerjaan.

Pada observasi awal, Penulis menemukan beberapa permasalahan, antara lain: Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Beberapa keluhan juga disampaikan oleh masyarakat mengenai lambatnya pengurusan dokumen-dokumen kependudukan yang diakibatkan oleh faktor kinerja petugas. Keterlambatan antara lain diakibatkan terganggunya jaringan komputer yang berfungsi untuk pengolahan data sehingga terlambat pula audit data untuk diserahkan ke pusat dinas Kabupaten Bandung yang seharusnya dilaporkan maksimal 14 hari kerja. Masalah lain yang dihadapi adalah terhambatnya pelayanan administrasi kependudukan akibat pegawai kurang disiplin, yang terlambat masuk atau sering pulang sebelum waktu yang ditentukan. Kinerja yang kurang baik ini akhirnya menimbulkan keterlambatan dalam pelayanan sehingga kerap kali membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan (Veranita, 2021). Kerap kali keluhan mengenai sarana dan prasarana kantor juga disampaikan oleh masyarakat terutama yang berkaitan dengan fasilitas ruangan yang kurang nyaman, fasilitas parkir yang kurang memadai, toilet yang kurang bersih, dan keluhan-keluhan lain.

Mengingat pentingnya kinerja dalam bekerja sebagai persyaratan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap pegawai atau aparatur pemerintah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, tetapi berdasarkan kondisi pengamatan yang terlihat, bawa kinerja kerja pegawai masih kurang dan belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan yaitu kinerja yang dapat mendukung terciptanya dan terwujudnya kualitas pelayanan yang lebih baik. Masalah-masalah di atas menarik perhatian untuk diteliti

seberapa besar pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Pegawai

Job Performance atau *Actual Performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang pegawai atau organisasi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Menurut Mangkunegara (2009: 22) “Kinerja merupakan prestasi kerja yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan”, sedangkan

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins, 2006:260): Kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

Kualitas Pelayanan

Sinambela (2006: 6) dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pelayanan Publik*, mengemukakan bahwa: Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang dikenal dengan konsep pelayanan prima. Kualitas pelayanan publik merupakan mutu atau kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan atau masyarakat (*meeting the needs of costumers*). Kualitas menurut Tjiptono (2005: 2) dalam bukunya yang berjudul *Prinsip – Prinsip Total quality Service* mendefinisikan bahwa pengertian kualitas terdiri dari beberapa poin diantaranya:

- a. Kesesuaian dengan kecocokan atau tuntutan.
- b. Kecocokan untuk pemakaian

- c. Perbaikan untuk pemakaian
- d. Bebas dari kerusakan atau cacat
- e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
- f. Melakukan segala sesuatu secara benar dengan semenjak awal.
- g. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kualitas adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok, atau lembaga organisasi mengenai kualitas SDM, kualitas cara kerja, serta barang dan jasa yang dihasilkan. Kualitas juga mempunyai arti yaitu memuaskan kepada yang dilayani baik secara internal maupun eksternal yaitu dengan memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau masyarakat. Kualitas juga dapat dimaknai sebagai kinerja professional, yang orientasinya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hak dasarnya berupa pelayanan.

Menurut Zeitham, et.al dalam Tjiptono (2005:10) ada lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan yaitu: Bukti Langsung (*tangibles*), Daya tanggap (*responsiveness*), Keandalan (*reability*), Jaminan (*assurance*), dan Empati (*emphaty*).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan Variabel Bebas (*Independent Variable*) adalah Kinerja Pegawai (indikator: Kualitas Pegawai, kuantitas pegawai, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian pegawai). Sedangkan Variabel Terikatnya (*Dependent Variable*) adalah Kualitas Pelayanan Indikator: Bukti Langsung (*tangibles*), Daya Tanggap (*responsiveness*), Keandalan (*reability*), Jaminan (*assurance*) dan Empati (*emphaty*). Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Populasi dalam

penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung selaku pengguna layanan publik, dengan sampel sebanyak 24 orang responden. Untuk pengujian validitas menggunakan pendekatan Statistik Non-Parametrik dengan rumus Spearman Rank Correlation Coefisients dan sudah dinyatakan “valid”. Sedangkan pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan dengan teknik belah dua (Split Half) dari Spearman Brown (Sugiyono, 2010:138). Pengujian Reliabilitas Sudah Dinyatakan “Reliabel”.

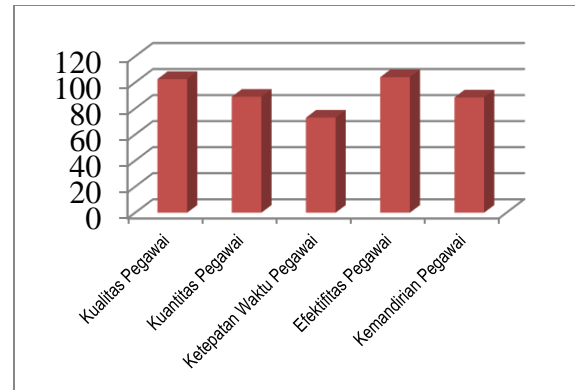
Jenis data yang diteliti mencakup data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dalam persentase, maka digunakan koefisien penentu atau Koefisien Determinan (KD) Hipotesis yang diajukan adalah: “terdapat pengaruh signifikan kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa kinerja pegawai di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sebesar 897 (dalam kategori baik)

Dari analisis jawaban setiap indikator mengenai kinerja pegawai diperoleh hasil bahwa tingkat persetujuan terhadap kinerja pegawai adalah $(897 : 1200) \times 100 \% = 74,75 \%$ dari yang diharapkan 100 %.

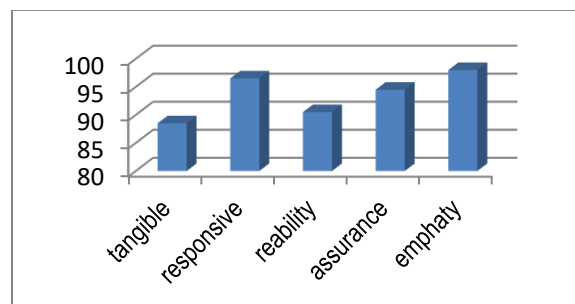


Gambar 1. Grafik Hasil Pengolahan Data Kuesioner Kinerja Pegawai Variabel (X)
Hasil Pengolahan Penulis: 2020

Berdasarkan grafik diatas terdapat kesamaan nilai, dapat diketahui bahwa tingkat persetujuan paling rendah adalah sebesar 73 yang terdapat pada pada indikator ke 3 yaitu Ketepatan Waktu Pegawai.

Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung adalah sebesar 915, setuju bahwa kualitas pelayanan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung termasuk **kategori baik**, karena Jumlah skor ideal adalah 1200, maka tingkat persetujuan terhadap kualitas pelayanan adalah $(915:1200) \times 100 \% = 76,25 \%$ dari yang diharapkan 100 %



Gambar 2. Garfik Hasil Pengolahan Data Kuesioner Kualitas Pelayanan Variabel (Y)

Hasil Pengolahan Penulis: 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat persetujuan paling rendah adalah sebesar 88,5 yang terdapat pada pada indikator ke satu yaitu Bukti Langsung (*Tangible*). Dalam penelitian yang telah dilakukan yang menggunakan analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kinerja pegawai dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Analisis korelasi yang digunakan adalah koefisien *Rank spearman* Sebagai berikut:

Tabel 2
Koefisien Korelasi Rank Spearman

OBSERVA SI	Skor		Ranking		di (R X - RY)	di ²
	(X)	(Y)	(X)	(Y)		
1	35	36	5	5	0	0
2	37	38	11	11,5	-0,5	0,25
3	39	40	18	19,5	-1,5	2,25
4	35	31	5	1	4	16
5	33	36	1,5	5	-3,5	12,25
6	40	39	21	16,5	4,5	20,25
7	36	38	8,5	11,5	-3	9
8	39	40	18	19,5	-1,5	2,25
9	38	38	14,5	11,5	3	9
10	38	38	14,5	11,5	3	9
11	41	42	23	22,5	1,5	2,25
12	37	38	11	11,5	-0,5	0,25
13	40	40	21	19,5	1,5	2,25
14	40	40	21	19,5	1,5	2,25
15	38	42	14,5	22,5	-8	64
16	39	39	18	16,5	-1,5	2,25
17	35	35	5	2	3	9
18	36	36	8,5	5	3,5	12,25

19	43	43	24	24	0	0
20	35	36	5	5	0	0
21	38	38	14,5	11,5	3	9
22	35	36	5	5	0	0
23	33	38	1,5	11,5	-10,5	110,25
24	37	38	11	11,5	-0,5	0,25
Jumlah						295

Hasil Pengolahan Penulis: 2020

Tabel 3

Tabel Angka Kembar Variabel X dan Y

N o	Angka Kemba r	T	Tx=(t ³ -t)/12	Angka Kemba r Y	t	Ty=(t ³ -t)/12
1	33	2	0,5	36	5	10
2	35	5	10	38	8	42
3	36	2	0,5	39	2	0,5
4	37	3	2	40	4	5
5	38	4	5	42	2	0,5
6	39	3	2			
7	40	3	2			
Jumlah		$\sum TX$	22		$\sum TY$	58

Hasil Pengolahan Penulis: 2020

Diketahui:

Setelah diperoleh faktor korelasi tersebut, kemudian nilai $\sum TX^2$ dan $\sum Y^2$ dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum X^2 &= \frac{N^3 - N}{12} - \sum TX \\ &= \frac{24^3 - 24}{12} - 22 = 1.128 \end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned} \sum Y^2 &= \frac{N^3 - N}{12} - \sum TY \\ &= \frac{24^3 - 24}{12} - 58 = 1.092 \end{aligned}$$

Rumus koefisien korelasi *rank-spearman* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} rs &= \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{\sqrt{\sum X^2 \times \sum Y^2}} \\ &= \frac{1.128 + 1.092 - 295}{\sqrt{1.298 \times 1.092}} \\ &= \frac{925}{\sqrt{1.231.776}} \end{aligned}$$

$$= \frac{1.925}{2.219,71} = 0,87$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,87 hal ini menunjukkan bahwa hubungan kinerja pegawai (X) dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan(Y) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung berkorelasi Positif, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkatan hubungan Sangat Erat, artinya apabila kinerja pegawai baik, maka kualitas pelayanan administrasi kependudukan akan baik.

Koefisien Determinasi (Kd)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja pegawai variable (X) terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung variabel (Y) kepuasan pelanggan, penulis menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Kd &= rs^2 \times 100\% \\ &= 0,87^2 \times 100\% \\ &= 0,7569 \times 100\% = 75,69\% \end{aligned}$$

Nilai ideal atau maksimum untuk variabel (X) kinerja pegawai dan variabel (Y) kualitas pelayanan administrasi kependudukan adalah 100%. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi determinasi diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebesar 75.69% dan sisanya 24,31% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Berdasarkan penelitian yng telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan didukung materi –materi yang telah penulis dapatkan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil pannelitian dan pengolahan data, diperoleh bahwa kinerja pegawai di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sudah masuk kriteria Baik, sebesar 74,75%, begitupula dengan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung masuk kreteria Baik, yaitu 76,25 %
- b. Berdasarkan hasil perhitungan *Rank Spearman* diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,87 hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung memiliki hubungan yang Sangat Erat. Adapun perhitungan koefisien detriminasi di peroleh hasil sebesar 75,69 % hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebesar 75,69 % dan memiliki sisa 24,31 % dipengaruhi oleh faktor lain.
- c. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan yang sering ditemui karna pegawai yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang ditetapkan, keterlambatan dalam masuk kerja dan hambatan dalam fasilitas, sarana dan prasarana yang belum lengkap adalah selain dengan menegakkan aturan melalui teguran sanksi, memperbaiki jaringan , dan mengajukan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pada usaha peningkatan pelayanan publik sehingga proses pelayanan berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Debbi, S. R. Y., & Kania, I. (2010). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Tiket Kereta Api Di

- Stasiun Bandung. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP Universitas Garut*, 18(2), 220–229.
- Fernandez, I. P. G. H., Supriyanti, N. W., & Wijaya, K. A. S. (n.d.). Pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana. 3, 1–12.
- Jamaluddin, Y. (2016). Model Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal TAPIs*, 12(1), 54–68.
- Kurniawan, I. (2011). Implementasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat dalam layanan perizinan bidang kesehatan di Kantor Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung(studi kasus pada layanan perizinan depot isi ulang air minum mineral). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 159–171.
- Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA*, 10(3), 569–586. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Maryani. (2013). Dampak Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan Pegawai Pada Kantor Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Manajemen Masagena*, 8(1), 206–215.
- Purba, Michael & Mira Veranita, (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Di Scarves And Pashmina Alisha Fancy Shop), *Jurnal Co-Management Volume 4 no.1 tahun 2021 Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)*
- Veranita, Mira & Hani Hatimatunnisani (2021), *Kualitas Pelayanan Publik Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan PT PLN (Persero) Rayon Bandung Selatan*, *Jurnal E-Bis Volume 5 No.1/ 2021, Politeknik Dharma Patria Kebumen*
- Literatur**
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfa Beta
- Napitupulu, Paimin. (2007). *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung: PT. Alumnus.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFPE.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. (2010). *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Lijan Poltak (2010) *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan, Implementasi*; Jakarta. Bumi Aksara
- Robbins SP, at al. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. (2005). *Prinsip –prinsip Total Quality*. Yogyakarta: Andi.
- Dokumen**
- Arsip Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 Ayat 2 tentang Kependudukan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Admnistrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bandung

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan.